

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas-tugas pemerintahan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 dapat rampung dan diselesaikan.

LAKIP ini disusun sebagai perwujudan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan merupakan salah satu upaya untuk memberikan informasi terkait pertanggungjawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar yang telah dilakukan selama tahun 2021 sekaligus sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi untuk maksud tersebut diatas maka diperlukan pengembangan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan hasil tersebut diatas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2021 yang memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rancangan tahun 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar, tidak terlepas dari kerja sama semua pihak baik dalam perumusan program kegiatan, maupun dalam implementasi dan pelaksanaan pengawasannya.

Kami sadari dalam penyusunan laporan ini, masih jauh dari kata sempurna dan belum sesuai dengan yang diharapkan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan umpan balik (feedback) baik berupa saran maupun masukan dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk masa yang akan datang dapat lebih baik atau sempurna lagi.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP ini sehingga dapat diselesaikan.

Polewali, 10 Februari 2022

KEPALA DINAS PMD

**Hj. ANDI NURSAMI M, SE, M.Adm.KP**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19650625 199503 2 001

## DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan	.....	1
A. Latar Belakang	.....	1
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	.....	3
BAB II Perencanaan Kinerja	.....	8
A. Rencana Strategis	.....	8
B. Penetapan Kinerja Tahun 2021	.....	10
BAB III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	.....	12
A. Akuntabilitas Kinerja	.....	12
B. Akuntabilitas Keuangan	.....	63
BAB IV Penutup	.....	65
Lampiran :		
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021		
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2021		
3. Realisasi Anggaran Tahun 2021		

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang dikenal dengan akronim SAKIP, merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*performancebase management*) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja dalam rangka mendorong pemerintahan agar lebihberdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Terdapat 4 (empat) komponen besar SAKIP, yaitu : Perencanaan Kinerja dan Penganggaran, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Kinerja. Pelaporan Kinerja sendiri disusun setelah berakhirnya periode Perencanaan Kinerja sebagai wujud pertanggung-jawaban Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud pemenuhan terhadap ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Setiap penggunaan anggaran oleh Instansi Pemerintah harus didasarkan pada kinerjasasaran yang jelas dan terukur, serta dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dengan demikian, LAKIP merupakan bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya sesuai perencanaan strategis (*strategic planning*) yang ditetapkan.

Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran berjalan yaitu 1 (satu) tahun secara lengkap memuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu laporan capaian terhadap target kinerja yang telah ditetapkan, perbandingan capaian tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya serta mengungkapkan keberhasilan dan kegagalan dalam upaya pencapaian target kinerja. LAKIP ini juga merupakan media pertanggungjawaban Pemerintah secara terukur yang berorientasi hasil (*result oriented*). Dengan LAKIP ini diharapkan tuntutan akuntabilitas sebagaimana tertuang dalam kebijakan reformasi birokrasi dapat terpenuhi.

Untuk mengatasi tantangan, perkembangan dan tuntutan masyarakat mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Polewali Mandar untuk mempersiapkan diri tetao eksis dalam proses pembangunan perbaikan dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi.

Maksud menyusun rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai dokumen resmi yang dipersyaratkan bagi SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai pedoman dasar melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

#### **A. Latar Belakang**

Sejalan dengan dasar pola dan struktur organisasi yang baru, struktur organisasi dan nomenklatur baru dengan peraturan dasar Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja termasuk Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa dengan menyusun dasar/pedoman pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung program Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar, yang diaplikasikan melalui program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang harus dipertanggungjawabkan sebagai tolak ukur capaian kinerja yang merupakan penjabaran rencana strategis sebagai bentuk pelaksanaan keuangan.

#### **A. Dasar Hukum Penyusunan Laporan**

Adapun dasar hukum penyusunan LAKIP antara lain sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lemaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

7. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2012 tentang Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2009-2014.
8. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
9. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tugas pokok dan fungsi Perangkat Organisasi Inspektorat BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
10. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2012 tentang Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009-2014.
11. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.
14. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021

**B. Maksud dan Tujuan**

- a. Untuk memaparkan pencapaian Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024 yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021;
- b. Untuk menggambarkan perbandingan capaian indikator kinerja tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan;
- c. Untuk menyajikan keberhasilan dan kegagalan berikut kendala dan solusi yang dilakukan pada tahun anggaran 2021

## **Tujuan**

- a. Untuk menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta stakeholder yang membutuhkan;
- b. Untuk menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja periode yang akan datang;
- c. Untuk menjadi bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan
- d. Untuk menjadi bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

## **C. Kondisi Organisasi**

### **Kondisi Kelembagaan**

#### **Tujuan Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Kabupaten dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : membantu bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pemerintah kabupaten dalam lingkup pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diatur pada pasal 1 poin 49 bahwa tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan pengertian Sasaran yang diatur di dalam permendagri yang sama adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkatdaerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Dengan mengacu kepada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, maka berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, maka ditetapkanlah tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, DPMD Kabupaten Polewali Mandar telah merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

**TUJUAN : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**  
**Indikator : Angka Kemiskinan**

Untuk mencapai tujuan maka ditetapkanlah sasaran strategis sebagai berikut :

**SASARAN 1 : Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal**

**Indikator : Persentase Desa Maju, Mandiri**

**Persentase Bumdesa dengan kategori Berkembang, Maju, Mandiri**

**Persentase Desa yang menerapkan Teknologi Tepat Guna**

## **SASARAN 2 : Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Desa**

**Indikator : Persentase Desa dengan status Kurang berkembang, Berkembang dan Cepat Berkembang**

## **SASARAN 3 : Meningkatkan Kualitas Manajemen Perkantoran**

**Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder**

## **SASARAN 4 : Meningkatkan Kualitas Kinerja Satuan Kerja**

**Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah**

## **SASARAN 5 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan PD**

**Indikator : Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah**

Untuk mengukur pencapaian dari tujuan dan sasaran dimaksud diatas, ditetapkanlah indikator-indikator utama dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

### 1. Sasaran 1: Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal

Indikator : Persentase Desa Maju, Mandiri

Persentase Bumdesa dengan kategori Berkembang, Maju, Mandiri

Persentase Desa yang menerapkan Teknologi Tepat Guna

Formulasi Perhitungan Tingkat Perkembangan Bumdesa

NO	POIN	KATEGORI
1	25 s/d 49	Dasar
2	50 s/d 74	Tumbuh
3	75 s/d 85	Berkembang
4	Diatas 86	Maju

### 2. Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Desa

Indikator : Persentase Desa dengan status Kurang Berkembang, Berkembang dan Cepat Berkembang

Formulasi Perhitungan Tingkat Perkembangan Desa

NO	POIN	KATEGORI
1	$\leq 300$	Kurang Berkembang
2	301 – 450	Berkembang
3	$\geq 451$	Cepat Berkembang

3. Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas Manajemen Perkantoran

Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder

Formulasi Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder

$$IKM = \text{Jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) tertimbang per unsur} \times 25$$

Keterangan

U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan

NRR = Nilai rata-rata

IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat

(\*) = Jumlah NRR IKM tertimbang

(\*\*) = Jumlah NRR Tertimbang x 25

NRR Per = Jumlah nilai per unsur dibagi

Unsur Jumlah kuesioner yang terisi

NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,071

per unsur

No.	UNSUR PELAYANAN	NRR
U1	dengan Jenis Pelayanan (U1)	0,379
U2	Kemudahan Sistem, Mekanisme & Prosedur Pelayanan (U2)	0,376
U3	Kecepatan Waktu (KW) dalam memberikan Pelayanan (U3)	0,362
U4	Penerapan Biaya/Tarif dalam Pelayanan (U4)	0,435
U5	dengan hasil yang diberikan (U5)	0,370
U6	Kompetensi/Kemampuan Petugas dalam Pelayanan (U6)	0,379
U7	terkait Kesopanan dan Keramahan (U7)	0,405
U8	Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan (U8)	0,383
U9	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan (U9)	0,430

Mutu Pelayanan :	
A	Sangat Baik (81,26-100,00)
B	Baik ( 62,51-81,25)
C	Kurang ( 43,76-62,50)
D	Tidak Baik (25,00-43,75)

4. Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas Kinerja Satuan Kerja

Indikator: Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Formulasi Perhitungan : Merupakan hasil penilaian LHE Inspektorat

5. Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah

Indikator: Opini Pengelolaan Keuangan

Formulasi Perhitungan : Merupakan hasil penilaian Badan Keuangan

**A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji hasil kerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, berdasarkan rencana strategis, kemampuan APBD dan kemampuan sumberdaya lainnya. Tujuan dilakukannya penetapan kinerja ada 2 (dua) yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum penetapan kinerja adalah instensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Sedangkan tujuan khusus adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen Perangkat Daerah bersama jajarannya, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Adapun perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 1  
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal	1. Persentase Desa Maju Mandiri 2. Persentase Bumdesa dengan kategori : a. Berkembang b. Maju c. Mandiri 3. Persentase desa yang menerapkan inovasi TTG	14,58%  57,64% 0,3403 0,0833  90,28%
2	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Status : a. Kurang Berkembang b. Berkembang c. Cepat Berkembang	31,94% 61,12% 6,94%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WTP
5	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Sangat Baik

#### B. Tujuan Umum

Berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah “Mewujudkan Otonomi Desa Dan Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ekonomi, Sosial Dan Budaya”.

#### Tujuan Khusus

Untuk mendukung tujuan umum, dalam renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan delapan tujuan khusus yaitu:

- a. Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.
- b. Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.
- c. Mewujudkan tatanan kehidupan sosial Budaya Masyarakat yang maju dan dinamis melalui pelestarian adat istiadat dan budaya lokal, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan ketahanan dan

kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender serta peningkatan kemandirian tenaga kerja pedesaan.

- e. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat.
- f. Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendaya gunakan Teknologi Tepat Guna.
- g. Meningkatkan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- h. Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Desa lingkup regional.



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja dimaksudkan untuk menilai, menganalisa, dan menginformasikan mengenai hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga untuk menjelaskan tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja yang dicapai instansi pemerintah dan perangkatdaerah. Menilai dan menganalisis capaian kinerja sangatlah penting, untuk meyakinkan bahwa kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan. Dengan demikian hasil pengukuran akan memudahkan kita untuk menilai apakah “ berhasil atau tidak “. Analisis capaian kinerja dibangun secara menyeluruh pada semua level organisasi untuk memastikan optimalnya mekanisme pengumpulan data kinerja dan sebagai bahan review perbaikan kinerja setiap levelnya pada tahun selanjutnya. Penyajian analisis akuntabilitas kinerja perangkat daerah tahun 2021, diupayakan dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja tujuan Renstra untuk kondisi 2021;
2. Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah diperjanjikan untuk kondisi tahun 2021;
3. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya;
4. Uraian tentang program-program yang mendorong pencapaian kinerja sasaran;
5. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target dan solusi yang telah dilakukan, serta
6. Analisis akuntabilitas keuangan tahun 2021.

#### **A. AKUNTABILITAS KINERJA**

Analisis dan evaluasi kinerja, dimaksudkan untuk menghitung capaian kinerja dari setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan serta dilakukan analisis pencapaian kinerja dengan menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja yang menggambarkan kegagalan dan keberhasilan masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil-hasil perhitungan pengukuran kinerja tersebut, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan.

**Sasaran 1: Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal****Indikator1: Persentase Bumdes dengan status Kurang Berkembang, Berkembang dan Cepat Berkembang****a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021**

Capaian indikator persentase Bumdes Berkembang, Maju dan Mandiri

KATEGORI	TAHUN 2020	TAHUN 2021
DASAR	57	57
TUMBUH	75	82
BERKEMBANG	4	4
MAJU	0	0

Pembangunan ekonomi suatu wilayah lebih mengarah pada pendekatan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya lokal yang merupakan faktor-faktor endogen wilayah tersebut secara optimal dan maksimal. Penekanan pada pengembangan potensi lokal inilah yang membawa pembahasan penelitian ini menuju kekonsep pengembangan ekonomi lokal. Adapun Pengembangan Ekonomi Lokal sendiri pada prinsipnya merupakan "Suatu proses ketika aktor-aktor di dalam komunitas baik kota atau desa, pemerintah, swasta dan masyarakat bekerjasama secara kolektif untuk menciptakan kondisi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan ekonomi lokal juga perlu diarahkan untuk mendukung perkembangan sektor-sektor ekonomi yang mempunyai potensi menciptakan kesempatan kerja yang luas dan memiliki prospek yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah

**b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA**

Pada tabel di bawah ini disajikan sebagai perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja. Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja antara 2019 dengan tahun 2020 tetap atau tidak berubah. Sasaran Strategis 1 : Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal untuk tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya :

**Tabel 2****PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2020 dan 2021) UNTUK SASARAN 1**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Berkembang Usaha Ekonomi Desa	Bumdes dengan status : Dasar Tumbuh Berkembang Maju	57 75 4 0	57 82 4 0

### **C. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET 5 TAHUN RENSTRA**

Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 dengan Sasaran Strategis 1 : Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal dengan target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024.

**Tabel 3**

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 1 TAHUN 2020 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019-2024

KATEGORI	TAHUN 2020	TAHUN 2021
DASAR	57	57
TUMBUH	75	82
BERKEMBANG	4	4
MAJU	0	0

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 terhadap target jangka menengah (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024 dapat dianalisa bahwa untuk sasaran 1 :Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal dengan indikator persentase Bumdes Berkembang, Maju dan Mandiri, perlu dilakukan perbaikan target di tahun-tahun berikutnya.

### **d. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 1 : Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal dengan indikator persentase Bumdes Berkembang, Maju dan Mandiri yang dijalankan oleh Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna dengan jumlah pegawai sebanyak 5 (lima) pegawai dengan menggunakan anggaran Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa serta Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa dengan anggaran Rp.42.623.494.

### **e. PROGRAM/KEGIATAN dan SUB KEGIATAN PENDUKUNG :**

Upaya pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 1 : Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal dengan indikator persentase Bumdes Berkembang, Maju dan Mandiri yang dijalankan di dukung oleh Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang terdiri atas Sub Kegiatan sebagai berikut :

Sub Kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa dengan anggaran Rp.42.623.494 (*Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*)

### **Penjelasan Realisasi Target Kegiatan**

Untuk realisasi kegiatan mencapai 100%, yaitu dari jumlah 144 desa telah terbentuk 144 Bumdesa. Dengan Bumdesa klasifikasi atau kategori Dasar sebanyak 57 Bumdesa, Bumdesa dengan klasifikasi atau kategori Tumbuh sebanyak 62 Bumdesa, Bumdesa dengan klasifikasi atau kategori Berkembang sebanyak 4 Bumdesa. Sedangkan Bumdesa dengan klasifikasi atau kategori Maju yang masih belum ada.

### **f. KENDALA SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN**

#### **Kendala**

Sampai laporan ini disusun, masih lebih dominannya Bumdesa yang masuk kategori atau klasifikasi Dasar dan kategori/klasifikasi Tumbuh, dimana sebagian besar masih dalam tahap merintis usaha Bumdesa.

#### **Solusi**

Perlu lebih banyak fasilitasi atau pendampingan bagi Bumdesa dalam bentuk legalitas organisasi atau lembaga, masih perlunya pengembangan Bumdesa melalui bimbingan teknis atau pelatihan bagi peningkatan kapasitas dan manajemen Bumdesa yang lebih dan maju.

NO	PARAMETER	SKOR NILAI	HASIL PENILAIAN	TOTAL NILAI	NILAI MAKS	BOBOT PENILAIAN	NILAI AKHIR
		A	B	C	D	E	F = (C/D) X E
<b>1</b>	<b>KELEMBAGAAN</b>						
<b>1 . 1</b>	PROSES PENDIRIAN BUMDESA						
	1. Pendirian Bumdesa tidak melalui Musdes dan tidak ada dokumen	1					
	2. Pendirian Bumdesa melalui Musdes, tanpa kajian usaha, Tim Pembentukan perumus dan tidak ada dokumen	2		0	24	25	0
	3. Pendirian Bumdesa melalui persiapan/pembentukan tim perumus, Kajian Usaha, Musdes dan tidak didukung dokumen yang lengkap	3					
	4. Pendirian Bumdesa melalui persiapan/pembentukan tim perumus, Kajian Usaha, Musdes dan didukung dokumen yang lengkap	4					
<b>1 . 2</b>	STRUKTUR ORGANISASI						
	1. Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional belum terbentuk	1					
	2. Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional terbentuk sebagian	2					
	3. Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional sudah terbentuk	3					
	4. Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional sudah terbentuk dan memiliki karyawan/staf	4					
<b>1 . 3</b>	KEPENGURUSAN						
	1. Pengurus, belum ditetapkan dengan SK Kades	1					
	2. Pengurus ditetapkan SK Kades tapi belum melaksanakan kegiatan	2					
	3. Pengurus (ditetapkan dengan SK Kades) sudah melaksanakan kegiatan sebagian	3					
	4. Pengurus (ditetapkan dengan SK Kades) sudah melaksanakan kegiatan seluruhnya sesuai job deskripsi.	4					
<b>1 . 4</b>	TUPOKSI						
	1. Tupoksi belum dijalankan oleh Penasehat, Badan pelaksana dan Pelaksana operasional	1					
	2. Tupoksi hanya dijalankan oleh salah satu organ struktur organisasi (Penasehat, Badan pelaksana dan Pelaksana operasional)	2					
	3. Tupoksi hanya dijalankan oleh dua organ struktur organisasi (Penasehat, Badan pelaksana dan Pelaksana operasional)	3					
	4. Semua organ struktur organisasi (Penasehat, Badan pelaksana dan Pelaksana operasional) sudah menjalankan tupoksi secara benar	4					
<b>1 . 5</b>	KERJASAMA						
	1. BUMDesa belum melaksanakan kerjasama	1					
	2. BUMDesa melakukan kerjasama antar Desa atau dengan pihak ke tiga	2					
	3. BUMDesa melakukan kerjasama antar Desa atau dengan pihak ke tiga untuk pengembangan usaha	3					
	4. BUMDesa melakukan kerjasama antar Desa dan pihak ke tiga untuk pengembangan usaha	4					
<b>1 . 6</b>	PROGRAM KERJA						

	1.	Tidak ada program kerja	1					
	2.	Memiliki program kerja tapi tidak dilaksanakan	2					
	3.	Ada program kerja dan dilaksanakan sebagian	3					
	4.	Ada program kerja dan sudah dilaksanakan semuanya	4					
<b>2</b>	<b>ATURAN/LEGALITAS</b>							
<b>2</b> . <b>1</b>	PERATURAN BUMDES							
	1.	Bumdesa hanya memiliki Perdes dan SK Kades	1					
	2.	Bumdesa memiliki Perdes, SK Kades dan AD ART	2		0	4	10	0
	3.	Bumdesa memiliki Perdes, SK Kades dan AD ART, SOP	3					
	4.	Bumdesa memiliki Perdes, AD-ART, SK Kades, SOP dan Unit Usaha berbadan Hukum	4					
<b>3</b>	<b>USAHA BUMDESA</b>							
<b>3</b> . <b>1</b>	UNIT USAHA							
	1.	Mempunyai 1 unit usaha belum berjalan	1					
	2.	Mempunyai 1 unit usaha telah berjalan	2		0	12	30	0
	3.	Mempunyai lebih dari 1 unit usaha telah berjalan sebagian	3					
	4.	Mempunyai lebih dari 1 unit usaha semuanya berjalan	4					
<b>3</b> . <b>2</b>	PASAR							
	1.	Produk Usaha BUMDesa dipasarkan di lokal Desa	1					
	2.	Produk Usaha BUMDesa dipasarkan di tingkat Kecamatan	2					
	3.	Produk Usaha BUMDesa dipasarkan di tingkat Kabupaten dan atau Provinsi	3					
	4.	Produk Usaha BUMDesa sudah go publik (nasional dan internasional)	4					
<b>3</b> . <b>3</b>	KEBERLANJUTAN							
	1.	Usaha tidak berbasis potensi Desa, tidak prospek dan kurang dukungan Pemdes dan masyarakat.	1					
	2.	Usaha berbasis potensi Desa, tidak prospek tapi kurang dukungan oleh Pemdes dan masyarakat	2					
	3.	Usaha berbasis potensi Desa, sangat prospek dan di dukung oleh Pemdes dan masyarakat	3					
	4.	Usaha berbasis potensi Desa, sangat prospek dan di dukung penuh oleh Pemdes, masyarakat dan stakeholder lainnya	4					
<b>4</b>	<b>ADMINISTRASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN</b>							
<b>4</b> . <b>1</b>	PEMBUKUAN							
	1.	Administrasi dan Pembukuan belum dikerjakan	1					
	2.	Administrasi dan Pembukuan masih sederhana dan belum tertib	2					
	3.	Pengelolaan Administrasi dan pembukuan cukup memadai telah dilaksanakan tetapi belum tertib	3					
	4.	Pengelolaan Administrasi dan Pembukuan telah memadai, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan	4		0	12	10	0
<b>4</b> . <b>2</b>	LAPORAN							
	1.	Tidak ada laporan secara rutin	1					
	2.	Hanya membuat salah satu Laporan (keuangan dan perkembangan kegiatan) secara rutin	2					
	3.	Laporan (keuangan dan perkembangan kegiatan) dibuat lengkap dan rutin setiap bulan.	3					

	4.	Laporan (keuangan dan perkembangan kegiatan) dibuat rutin, setiap bulan sudah berbasis teknologi informasi/Komputer	4					
<b>4</b>	<b>PERTANGGUNGJAWABAN</b>							
<b>.3</b>	1.	Pertanggungjawaban keuangan dan perkembangan usaha tidak dilakukan melalui musdes	1					
	2.	Melaksanakan pertanggungjawab melalui musdes setahun sekali kurang didukung laporan keuangan dan perkembangan usaha	2					
	3.	Pertanggungjawaban sudah dilakukan melalui musdes sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun dan didukung laporan keuangan dan perkembangan usaha	3					
	4.	Pertanggungjawaban sudah dilakukan melalui musdes sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun dan didukung laporan hasil audit keuangan dan perkembangan usaha	4					
<b>5</b>	<b>PERMODALAN DAN ASET</b>							
<b>5</b>	<b>MODAL</b>							
<b>.1</b>	1.	Modal Usaha dari penyertaan modal Desa	1					
	2.	Modal Usaha dari penyertaan modal Desa dan penyertaan masyarakat	2					
	3.	Modal Usaha dari penyertaan modal Desa, penyertaan masyarakat dan Hibah	3					
	4.	Modal Usaha dari penyertaan modal Desa, penyertaan masyarakat, Hibah dan Kerjasama dengan pihak ke Tiga	4					
<b>5</b>	<b>INVENTARIS</b>							
<b>.2</b>	1.	Belum memiliki kantor permanen dan inventaris kantor	1					
	2.	Sudah memiliki Inventaris Kantor atau memiliki Kantor tapi masih sewa/pinjam	2					
	3.	Sudah memiliki kantor permanen dan inventaris kantor	3					
	4.	Sudah memiliki kantor permanen, inventaris kantor dan aset tetap lainnya	4					
<b>5</b>	<b>ASET</b>							
<b>.3</b>	1.	Jumlah asset Kurang dari 200 Juta	1					
	2.	Jumlah asset lebih dari 200 Juta dan kurang dari 500 Juta	2					
	3.	Jumlah asset lebih dari 500 Juta sampai dengan 1 milyar	3					
	4.	Jumlah asset lebih dari 1 milyar	4					
<b>6</b>	<b>DAMPAK BUMDESA TERHADAP MASYARAKAT DESA</b>							
<b>6</b>	<b>DAMPAK EKONOMI</b>							
<b>.1</b>	1.	Kegiatan BUMDesa menggerus/menutup usaha yang ada masyarakat	1					
	2.	Kegiatan BUMDesa merugikan usaha yang ada dimasyarakat	2					
	3.	Kegiatan BUMDesa bersinergi/menguatkan usaha yang ada di masyarakat	3					
	4.	Kegiatan BUMDesa bekerjasama dan memberi keuntungan usaha yang ada dimasyarakat	4					
<b>6</b>	<b>DAMPAK SOSIAL</b>							
<b>.2</b>	1.	BUMDesa tidak memberikan dampak sosial	1					
	2.	BUMDesa memberi dampak penyediaan lapangan kerja	2					
				0	12	15	0	
				0	12	10	0	

	3.	BUMDesa memberi dampak terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat	3				
	4.	BUMDesa memberi dampak terhadap penyediaan lapangan kerja, daya beli masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat	4				
<b>6</b>		<b>DAMPAK BAGI PEMBANGUNAN DESA</b>					
<b>3</b>	1.	BUMDesa belum memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa	1				
	2.	BUMDesa Sudah memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa	2				
	3.	BUMDesa Sudah memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa dan masyarakat	3				
	4.	BUMDesa Sudah memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa, masyarakat dan pihak ketiga	4				
	<b>JUMLAH NILAI</b>					<b>100</b>	<b>0</b>
	<b>KESIMPULAN TINGKATPERKEMBANGAN BUMDESA</b>						
1		DASAR	25 – 49	<b>DASAR</b>			
2		TUMBUH	50 – 74				
3		BERKEMBANG	75 – 85				
4		MAJU	DIATAS 86				

## Sasaran 2 : Persentase Desa dengan Status Maju, Mandiri

### a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Capaian indikator persentase desa dengan status Maju dan Mandiri :

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Mandiri	-	-	-	-	-
2	Maju	-	-	-	12	12
3	Berkembang	0	44	79	89	94
4	Tertinggal	0	96	57	43	38
5	Sangat tertinggal	-	-	-	-	-

Dalam aspek peningkatan kualitas pemerintahan desa, persoalan umum yang dialami adalah aspek kualitas administrasi pemerintahan desa. Hal yang menyangkut administrasi antara lain dokumen perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pembinaan serta peningkatan kemampuan kepala desa beserta aparatnya dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa. kegiatan yang dimaksud seperti asistensi perencanaan dan penganggaran. Sosialisasi peraturan perundang-undangan, serta melalui Pelatihan Peningkatan SDM Perangkat/Aparat Desa.

### b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Pada tabel di bawah ini disajikan sebagai perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Desa untuk tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

**Tabel 4**

#### **PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2018 s/d 2021) UNTUK INDIKATOR 2**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Mandiri	-	-	-	-	-
2	Maju	-	-	-	12	12
3	Berkembang	0	44	79	89	94
4	Tertinggal	0	96	57	43	38
5	Sangat tertinggal	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja antara 2020 dengan tahun 2021, desa dengan kategori Kurang Berkembang semakin berkurang/menurun, begitu juga desa dengan kategori Cepat Berkembang mengalami kenaikan/terus bertambah dari 144 desa se-Kabupaten Polewali Mandar.

### **c. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET 5 TAHUN RENSTRA**

Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 dengan Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dengan target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024

**Tabel 5**

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 2 TAHUN 2019 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019-2024

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Mandiri	-	-	-	-	-
2	Maju	-	-	-	12	12
3	Berkembang	0	44	79	89	94
4	Tertinggal	0	96	57	43	38
5	Sangat tertinggal	-	-	-	-	-

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 terhadap target jangka menengah (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024 dapat dianalisa bahwa untuk Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pemerintahan desa dengan indikator kinerja persentase desa dengan status Kurang Berkembang, Berkembang dan Cepat Berkembang, perlu dilakukan perbaikan target di tahun-tahun berikutnya.

### **d. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas pemerintahan desa dengan indikator kinerja persentase desa dengan status Kurang Berkembang, Berkembang dan Cepat Berkembang, yang dijalankan oleh Bidang Pemerintahan Desa dengan jumlah pegawai sebanyak 10 (Sepuluh) orang dengan menggunakan anggaran Program Administrasi Pemerintahan Desa sebesar **Rp. 509.000.000.**

### **e. PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG :**

Upayapeningkatanpersentase desadenganindikator kinerja persentase desa dengan status Kurang Berkembang, Berkembang dan Cepat Berkembang di dukung oleh Program Administrasi Pemerintahan Desa yang terdiri atas Sub Kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dengan anggaran Rp. 41.800.854 (*Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*)
2. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa dengan anggaran Rp. 69.965.314 (*Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah*)

3. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa dengan anggaran Rp. 74.651.100 (*Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Seratus Rupiah*)
4. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa dengan anggaran Rp. 42.623.494 (*Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*)
5. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian KepalaDesa dengan anggaran Rp. 3.103.360.162 (*Tiga Milyar Seratus Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah*)
6. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dengan anggaran Rp. 51.109.932 (*Lima Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*)

#### **f. Penjelasan Realisasi Target Kegiatan**

Aspek kualitas administrasi menjadi penunjang penting dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa., berupa asistensi perencanaan dan penganggaran untuk penetapan kinerja atau realisasi kegiatan yang telah ditetapkan mencapai target 100%.

#### **g. KENDALA SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN**

##### **Kendala**

Sejak berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, banyak melahirkan aturan perundang-undangan yang menjadi turunannya. Tentu membawa banyak perubahan bagi pemerintah desa terutama mindset (pola pikir) yang sesuai manajemen pemerintahan sesuai amanat dari aturan perundang-undangan yang berlaku sekarang.

##### **Solusi**

Karena yang menjadi kendala utama adalah perlunya banyak pelatihan yang mengarah pada peningkatan SDM pemerintah desa karena anggaran yang ada dan turun ke desa sangat besar. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan desa adalah peningkatan kapasitas aparat desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan di desa melalui kegiatan pelatihan. Jumlah aparat desa yang telah menyelesaikan administrasi desa untuk periode 2019-2021 sebanyak 144 desa.

NO	EVALUASI PERKEMBANGAN DESA	INDIKATOR		SUBINDIKATOR	POINT		
1	BIDANG PEMERINTAHAN	PEMERINTAHAN DESA	1	Pelaksana Musyawarah Desa	1	Ada atau Tidak Ada	1 atau 2
				Peserta Musyawarah Desa	2	Tersedia tenaga kesehatan bidan	0,87%
			3		Tersedia tenaga kesehatan dokter	0,87%	
			4		Tersedia tenaga kesehatan lain	0,87%	
			2	Keberdayaan Masyarakat untuk	5	Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu	0,87%
				Kesehatan	6	Tingkat aktivitas posyandu	0,87%
			3	Jaminan Kesehatan	7	Tingkat kepesertaan BPJS	0,87%
		PENDIDIKAN	4	Akses Pendidikan Dasar dan Menengah	8	Akses ke Dasar SD/MI	0,87%
					9	Akses ke SMP/MTS	0,87%
					10	Akses ke SMU/SMK	0,87%
			5	Akses Pendidikan Non Formal	11	Kegiatan pemberantasan buta aksara	0,87%
					12	Kegiatan PAUD	0,87%
					13	Kegiatan PKBM/Paket ABC	0,87%
					14	Akses ke pusat keterampilan/ kursus	0,87%
			6	Akses ke Pengetahuan	15	Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa,	0,87%

NO	INDEKS DESAMEMBANGUN	DIMENSI		INDIKATOR	Nilai	
1	KETAHANAN SOSIAL (34%)	MODAL SOSIAL	7	Memiliki Solidaritas Sosial	16 Kebiasaan gotong royong di desa	0,87%
					17 Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak membayar	0,87%
					18 Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga	0,87%
					19 Terdapat kelompok kegiatan olahraga	0,87%
			8	Memiliki Toleransi	20 Warga desa terdiri dari beberapa suku atau etnis	0,87%
					21 Warga desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda	0,87%
					22 Terdapat keragaman agama di Desa	0,87%
			9	Rasa Aman Penduduk	23 Warga desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan,	0,87%
					24 Partisipasi warga mengadakan siskamling	0,87%
					25 Tingkat kriminalitas yang terjadi di Desa	0,87%
					26 Tingkat konflik yang terjadi di desa	0,87%
27 Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa	0,87%					

NO	INDEKS DESAMEMBANGUN	DIMENSI		INDIKATOR	Nilai	
1	KETAHANAN SOSIAL (34%)	MODAL SOSIAL	10	Kesejahteraan Sosial	28 Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa	0,87%
					29 Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial (Anak Jalanan, Pekerja Seks Komersial dan Pengemis)	0,87%
					30 Terdapat Penduduk yang bunuh diri	0,87%
		PERMUKIMAN	11	Akses ke Air Bersih dan Air	31 Mayoritas penduduk desa memiliki sumber air minum yang layak.	0,87%
				Minum Layak	32 Akses Penduduk desa memiliki air untuk mandi dan mencuci	0,87%
			12	Akses ke Sanitasi	33 Mayoritas penduduk desa memiliki Jamban.	0,87%
					34 Terdapat tempat pembuangan sampah.	0,87%
			13	Akses ke Listrik	35 Jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik.	0,87%
			14	Akses Informasi dan Komunikasi	36 Penduduk desa memiliki telepon selular dan sinyal yang kuat.	0,87%
					37 Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing	0,87%
					38 Terdapat akses internet	0,87%

NO	INDEKS DESAMEMBANGUN	DIMENSI		INDIKATOR	Nilai		
2	KETAHANAN (33%)	EKONOMI	15	Keragaman Produksi Masyarakat Desa	39	Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk	2,75%
			16	Tersedia Pusat Pelayanan	40	Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen)	2,75%
				Perdagangan	41	Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket)	2,75%
					42	Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan	2,75%
				17	Akses Distribusi/Logistik	43	Terdapat kantor pos dan jasa logistik
			18	Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan	44	Tersedianya lembaga perbankan umum (Pemerintah dan Swasta)	2,75%
					45	Tersedianya BPR	2,75%
					46	Akses penduduk ke kredit	2,75%
			19	Lembaga Ekonomi	47	Tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi)	2,75%

NO	INDEKS DESAMEMBANGUN	DIMENSI		INDIKATOR	Nilai	
2	KETAHANAN (33%)	EKONOMI	20	Keterbukaan Wilayah	48 Terdapat moda transportasi umum (Transportasi Angkutan Umum, trayek reguler dan jam operasi Angkutan Umum)	2,75%
					49 Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu)	2,75%
					50 Kualitas Jalan Desa (Jalan terluas di desa dengan aspal, kerikil, dan tanah)	2,75%
3	KETAHANAN EKOLOGI (33%)	EKOLOGI	21	Kualitas Lingkungan	51 Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	8,25%
					52 Terdapat sungai yg terkena limbah	8,25%
			22	Potensi rawan bencana dan tanggap bencana	53 Kejadian Bencana Alam (banjir, tanah longsong, kebakaran hutan)	8,25%
					54 Upaya/Tindakan terhadap potensi bencana alam (Tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana)	8,25%

# STATUS DESA INDEKS DESA MEMBANGUN

> 0,8155

## MANDIRI

adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

> 0,7072 s.d ≤ 0,8155

## MAJU

adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

> 0,5989 s.d ≤ 0,7072

## BERKEMBANG

adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

> 0,4907 s.d ≤ 0,5989

## TERTINGGAL

adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

≤ 0,4907

## SANGAT TERTINGGAL

adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

## Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa

### Indikator 1 : Persentase Desa dengan Status Kurang Berkembang, Berkembang dan Cepat Berkembang

#### a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Capaian indikator persentase desa dengan status Kurang Berkembang, Berkembang dan Cepat Berkembang :

KATEGORI	JUMLAH	KETERANGAN
KURANG BERKEMBANG	63	
BERKEMBANG	45	
CEPAT BERKEMBANG	36	

Dalam aspek peningkatan kualitas pemerintahan desa, persoalan umum yang dialami adalah aspek kualitas administrasi pemerintahan desa. Hal yang menyangkut administrasi antara lain dokumen perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pembinaan serta peningkatan kemampuan Kepala Desa beserta aparatnya dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa. kegiatan yang dimaksud seperti asistensi perencanaan dan penganggaran. Sosialisasi peraturan perundang-undangan, serta melalui pelatihan peningkatan sumber daya manusia aparat pemerintah desa.

#### b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Pada tabel dibawah ini disajikan sebagai perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa untuk tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

**Tabel 6**

#### PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2019 dan 2020) UNTUK SASARAN 2

KATEGORI	TAHUN 2019	TAHUN 2020
KURANG BERKEMBANG	52	63
BERKEMBANG	84	45
CEPAT BERKEMBANG	8	36

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja antara 2019 dengan tahun 2020, desa dengan kategori Kurang Berkembang semakin berkurang/menurun, begitu juga desa dengan kategori Cepat Berkembang mengalami kenaikan/terus bertambah dari 144 desa se-Kabupaten Polewali Mandar.

### **c. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET 5 TAHUN RENSTRA**

Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 dengan Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dengan target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024

**Tabel 7**

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 2 TAHUN 2020 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019-2024

KATEGORI	TAHUN 2019	TAHUN 2020
KURANG BERKEMBANG	52	63
BERKEMBANG	84	45
CEPAT BERKEMBANG	8	36

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 terhadap target jangka menengah (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024 dapat dianalisa bahwa untuk sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pemerintahan desa dengan indikator kinerja persentase desa dengan status Kurang Berkembang, Berkembang dan Cepat Berkembang, perlu dilakukan perbaikan target di tahun-tahun berikutnya.

### **d. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas pemerintahan desa dengan indikator kinerja persentase desa dengan status Kurang Berkembang, Berkembang dan Cepat Berkembang, yang dijalankan oleh Bidang Pemerintahan Desa dengan jumlah pegawai sebanyak 10 (Sepuluh) pegawai dengan menggunakan anggaran Program Administrasi Pemerintahan Desa sebesar Rp. 509.000.000.

### **e. PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG :**

Upaya peningkatan persentase desa dengan indikator kinerja persentase desa dengan status Sangat Tertinggal, Tertinggal, Berkembang dan Cepat Berkembang di dukung oleh Program Administrasi Pemerintahan Desa yang terdiri atas kegiatan sebagai berikut :

Sub Kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desadengan anggaran Rp.41.800.854 (*Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Lima Puluh Empat Rupiah*)
2. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desadengan anggaran Rp.69.965.314 (*Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah*)

3. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa dengan anggaran Rp.42.623.494 (Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)
4. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan anggaran Rp.3.103.360.162 (*Tiga Milyar Seratus Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah*)
5. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dengan anggaran Rp.51.109.932 (*Lima Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*)

#### **f. Penjelasan Realisasi Target Kegiatan**

Aspek kualitas administrasi menjadi penunjang penting dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa berupa asistensi perencanaan dan penganggaran untuk penetapan kinerja atau realisasi kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan mencapai target 100%.

#### **g. KENDALA SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN**

##### **Kendala**

Sejak berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, banyak melahirkan aturan perundang-undangan yang menjadi turunannya. Tentu membawa banyak perubahan bagi pemerintah desa terutama mindset (pola pikir) yang sesuai manajemen pemerintahan sesuai amanat dari aturan perundang-undangan yang berlaku sekarang.

##### **Solusi**

Karena yang menjadi kendala utama adalah perlunya banyak pelatihan yang mengarah pada peningkatan SDM pemerintah desa karena anggaran yang ada dan turun ke desa sangat besar. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan desa adalah peningkatan kapasitas aparat desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan di desa melalui kegiatan pelatihan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah desa karena bukan hanya dituntut untuk beradaptasi dengan regulasi atau aturan terkait tentang desa, tetapi juga kemampuan IT menjadi tuntutan bagi pemerintahan sekarang termasuk pemerintah desa mengingat banyaknya aplikasi yang mengharuskan aparat desa harus mampu menguasai aplikasi tersebut.

A. BIDANG PEMERINTAHAN

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
<b>I. PEMERINTAHAN DESA</b>					
1.	Musyawarah Desa	a. Pelaksanaan Musyawarah Desa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Apabila ada, Kapan Dilaksanakan (Waktu Pelaksanaan: Lampirkan <i>Fotocopy</i> Data Pendukung)
		b. Peserta Musyawarah Desa:			
		- Keterwakilan unsur masyarakat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Apabila ada, lampirkan <i>fotocopy</i> bukti daftar hadir notulen rapat
		- Keterwakilan unsur Pemerintah Desa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Apabila ada, lampirkan <i>fotocopy</i> bukti daftar hadir notulen rapat
		- Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Apabila ada, lampirkan <i>fotocopy</i> bukti daftar hadir notulen rapat
		- Waktu pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 1) setelah bulan juni tahun berjalan 2) sampai dengan bulan juni tahun berjalan	1 2	1 2	
		c. Materi yang dibahas di Musyawarah Desa apa saja:			
		- Penataan Desa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampirkan <i>fotocopy</i> dokumen

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		- Perencanaan Pembangunan Desa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampirkan <i>fotocopy</i> dokumen
		- Peraturan Desa tentang RPJMDesa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampirkan <i>fotocopy</i> dokumen
		- Peraturan Desa tentang RKPDesa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampirkan <i>fotocopy</i> dokumen
		- Peraturan Desa tentang APBDesa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampirkan <i>fotocopy</i> dokumen
		- Kerjasama Desa: 1) Kerjasama antar Desa Tidak ada Ada 2) Kerjasama dengan pihak ketiga TIDAK ADA ADA	1 2 1 2	1 2 1 2	Lampirkan <i>fotocopy</i> dokumen
		- Pembentukan BUMDesa: 1) Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa TIDAK ADA ADA	1	1	Lampirkan <i>fotocopy</i> dokumen

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		2) Penyertaan modal BUMDesa TIDAK ADA ADA	2 1	2 1	
		3) AD/ART TIDAK ADA ADA	2 1	2 1	
		4) Rapat pertanggungjawaban TIDAK ADA ADA	2 1	2 1	
		5) Aturan terkait dengan kepailitan TIDAK ADA ADA	2 1	2 1	
		6) Struktur organisasi BUMDesa Tidak Ada ADA	2 1 2	2 1 2	
		- Aset desa:			Lampirkan <i> fotocopy</i> dokumen
		1) Inventarisasi TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		2) Penambahan TIDAK ADA ADA	1	1	
		3) Pelepasan TIDAK ADA ADA	2 2	2 2	

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
			1	1	
2.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Sarana dan Prasarana:			
		- Ruang kerja TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		- Operasional dan tunjangan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		- Buku data keputusan Tidak ada ada	1 2	1 2	Lampirkan <i>fotocopy</i> dokumen
		- Buku data anggota TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		- Buku data kegiatan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampirkan <i>fotocopy</i> dokumen
		- Buku sekretariat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		- Mesin ketik/komputer TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		- Printer TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		- Peraturan Tata Tertib BPDes			Lampirkan <i>fotocopy</i> dokumen

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
3.	Pemerintah Desa	a. Gedung kantor ADA, DI RUMAH PRIBADI ADA, SEWA ADA, MILIK DESA, SEMIPERMANEN ADA, MILIK DESA, PERMANEN	1 2 3 4	1 2 3 4	
		b. Gedung Pertemuan/Balai Desa TIDAK ADA ADA, SEWA ADA, MILIK DESA, SEMIPERMANEN ADA, MILIK DESA, PERMANEN	1 2 3 4	1 2 3 4	
		c. Perangkat Desa - Jumlah Kepala Urusan (Kaur) 2 Kaur 3 Kaur - Jumlah Kepala Seksi (Kasi) 2 Kepala Seksi 3 Kepala Seksi Tingkat pendidikan Kaur dan Kasi SLTA/ sederajat (kurang atau sama dengan 50%) SLTA ke atas (di atas 50%)	1 2  1 2  1 2	1 2  1 2  1 2	
		d. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Tidak Ada ADA	1 2	1 2	
		e. Pengaturan Kewenangan - Perdes Kewenangan asal usul TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		- Perdes Kewenangan lokal skala Desa TIDAK ADA	1 2	1 2	

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		ADA			
		- Perdes Kewenangan yang ditugaskan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		- Apakah Batas Desa sudah ditetapkan BELUM DENGAN ORDINAT SUDAH DENGAN ORDINAT	1 4	1 4	
		- Luas wilayah BELUM DITENTUKAN SUDAH DITENTUKAN	1 4	1 4	Lampirkan Peta Wilayah Desa
		- Siltap Kades dan Perangkat (Nilai besarnya): DI BAWAH UPAH MINIMUM KABUPATEN DI ATAS UPAH MINIMUM KABUPATEN	1 4	1 4	
		- Berapa Perdes yg diterbitkan dalam 1 tahun 1-3 Lebih dari atau sama dengan 4	1 2	1 2	Lampirkan dokumennya
		- Berapa peraturan kepala desa yang diterbitkan dalam 1 tahun 1 Lebih dari atau sama dengan 2	1 2	1 2	
		- Berapa Peraturan bersama Kepala Desa yg diterbitkan dalam 1 tahun 1 2-3 Lebih dari 3	1 3 4	1 3 4	
		- Pernah tidaknya menjadi juara lomba desa dan tingkatannya TIDAK PERNAH PERNAH, TINGKAT KECAMATAN PERNAH, TINGKAT KABUPATEN/KOTA PERNAH, TINGKAT PROVINSI	1 2 3 4	1 2 3 4	Isi di tingkatan yang paling akhir

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		PERNAH, TINGKAT REGIONAL/NASIONAL	5	5	
		- Pernah tidaknya menjadi <i>Lab site</i> dari Kementerian/Lembaga (K/L)			
		TIDAK PERNAH	1	1	
		PERNAH	2	2	
		- Berapa kali dalam setahun Desa menerima Bimbingan Teknis dari			Lampirkan bukti dokumentasi/keikutsertaannya
		1) Pemerintah Pusat			
		TIDAK PERNAH	1	1	
		PERNAH 1 KALI	2	2	
		PERNAH 2-4	3	3	
		PERNAH LEBIH DARI 4 KALI	4	4	
		2) Pemerintah Provinsi	1	1	
		TIDAK PERNAH	2	2	
		PERNAH 1 KALI	3	3	
		PERNAH 2-4	4	4	
		PERNAH LEBI DARI 4 KALI	1	1	
			2	2	
		3) Pemerintah Kabupaten/Kota	3	3	
		TIDAK PERNAH	4	4	
		PERNAH 1 KALI			
		PERNAH 2-4			
		PERNAH LEBIH DARI 4 KALI			
		f. Jaringan Listrik			Sebutkan Jaringan Listrik Terbuat dari Apa?
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		g. Sumber Daya Listrik (PLN)			
		TIDAK STABIL	1	1	

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		STABIL	2	2	
		h. Sumber Daya Listrik (NON-PLN) TIDAK STABIL	1	1	
		STABIL	2	2	
		i. Perpustakaan TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
4.	Administrasi Desa	a. Administrasi Umum b. Administrasi Kependudukan c. Administrasi Keuangan d. Administrasi Pembangunan e. Administrasi BPDes f. Administrasi Lainnya ADA 1 ADA 2 ADA 3 ADA 4 ADA 5 LENGKAP	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	Isilah sesuai kepemilikan administrasinya
5.	Keuangan Desa	a. Rasio Jumlah Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Dana Desa (DD) 50% ke bawah Di atas 50%	1 4	1 4	
		b. Laporan Dana Desa (DD) TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		c. Alokasi Dana Desa (ADD) TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		d. Hibah/sumbangan pihak ketiga TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		e. Bantuan Keuangan dari Kabupaten/Kota			

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		f. Bantuan Keuangan Provinsi TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampirkan Asal Sumbernya
		g. Lain-lain pendapatan Desa yang Sah TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampirkan Asal Sumbernya
		h. Rasio Penghasilan Tetap Aparatur Desa Terhadap Belanja Pembangunan 30% Ke Atas Kurang dari 30%	1 2	1 2	
		i. SiLPA - SiLPA total Sama Dengan atau Di atas 30% Kurang 30% - SiLPA Dana Desa Sama Dengan atau Di atas 30% Kurang 30%	1 4 1 4	1 4 1 4	
		j. Hasil kekayaan Desa yang dipisahkan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Sebutkan Sumbermya
		k. Penyertaan modal Desa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Sebutkan Sumbermya
6.	Akuntabilitas, Pembinaan, Dan Pengawasan	a. Laporan Kades kepada Pemerintahan atasan - Laporan penyaluran dan realisasi penggunaan			

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		Dana Desa TIDAK ADA ADA - Laporan pertanggungjawaban APBDesa TIDAK ADA ADA - Bentuk laporan pertanggungjawaban berupa Perdes TIDAK YA	1 2 1 2 1 2	1 2 1 2 1 2	
		b. Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Penyampaian informasi kepada masyarakat (terkait materi secara umum). TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
HANYA DIISI OLEH KELURAHAN					
1.	Sarana Prasarana	a. Gedung kantor ADA, DI RUMAH PRIBADI ADA, SEWA ADA, MILIK PEMDA, SEMIPERMANEN ADA, MILIK PEMDA, PERMANEN	1 2 3 4	1 2 3 4	
		b. Gedung Pertemuan TIDAK ADA ADA, MILIK PEMDA, SEMIPERMANEN ADA, MILIK PEMDA, PERMANEN	1 2 3	1 2 3	
		c. Perangkat Kelurahan			

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		50% BUKAN PNS DI ATAS 50% PNS	1 2	1 2	
		d. Mesin tik/ komputer TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Kendaraan dinas lurah TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		f. Struktur Organisasi TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		g. Jaringan Listrik TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Sebutkan Sumber Daya Listrik Terbuat dari apa?
		h. Sumber Daya Listrik (PLN) TIDAK STABIL STABIL	1 2	1 2	
		i. Sumber Daya Listrik (NON-PLN) TIDAK STABIL STABIL	1 2	1 2	
		j. Perpustakaan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
3.	Akuntabilitas	Kotak Pengaduan Masyarakat TIDAK ADA ADA TAPI TIDAK DIMANFAATKAN ADA DAN DIMANFAATKAN	1 2 3	1 2 3	
4.	Administrasi	a. Laporan Kinerja Tahunan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Laporan Tahunan Lurah TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Papan Informasi Pelayanan			

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		d. Loker Pelayanan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		e. Buku Registrasi Pelayanan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		f. Buku Profil Kelurahan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	4	4	
		g. Buku Administrasi Umum			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		h. Buku Administrasi Kependudukan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		i. Buku Administrasi Keuangan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		j. Buku Administrasi Pembangunan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		k. Buku Administrasi Lainnya			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		l. Kartu Uraian Tugas			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		m. Peta Wilayah Kelurahan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	4	4	
		n. Peta Batas Kelurahan			

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	4	4	
II. KINERJA					
1.	Kinerja	a. Strategi dalam pemberdayaan masyarakat - Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat (P3MD) (Khusus diisi oleh Desa) TIDAK ADA ADA - Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat 2 tahun terakhir TIDAK ADA ADA - Fasilitasi dalam pemasaran produk unggulan dari masyarakat TIDAK ADA ADA	1 2 1 2 1 2	1 2 1 2	Lampirkan dokumennya
		b. Kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat Ada tidaknya regulasi dalam pemberdayaan masyarakat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampirkan dokumennya
		c. Pembinaan Kemasyarakatan - melakukan forum-forum kebersamaan seperti gotong royong 2 tahun terakhir TIDAK ADA ADA - <i>Reward</i> bagi perangkat dan kelompok masyarakat TIDAK ADA ADA	1 2 1 2	1 2 1 2	
		d. Budaya Kerja			

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- apakah telah mendata kehadiran pegawai secara rutin TIDAK YA</li> <li>- apakah telah memiliki standar jam pelayanan TIDAK YA</li> <li>- apakah sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan masyarakat BELUM ADA ADA</li> </ul>	<p style="text-align: center;">1 2</p> <p style="text-align: center;">1 2</p> <p style="text-align: center;">1 2</p>	<p style="text-align: center;">1 2</p> <p style="text-align: center;">1 2</p> <p style="text-align: center;">1 2</p>	
<b>III. INISIATIF DAN KREATIVITAS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>					
1.	Inisiatif dan kreativitas	a. Visi dan misi pemberdayaan masyarakat TIDAK ADA ADA	<p style="text-align: center;">1 2</p>	<p style="text-align: center;">1 2</p>	Lampirkan dokumennya
		b. Kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat: TIDAK ADA ADA	<p style="text-align: center;">1 2</p>	<p style="text-align: center;">1 2</p>	
		c. Eksistensi institusi pemberdayaan masyarakat dan aparaturnya TIDAK ADA ADA	<p style="text-align: center;">1 2</p>	<p style="text-align: center;">1 2</p>	
		d. Alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat dan aparaturnya desa (khusus diisi oleh desa) TIDAK ADA ADA	<p style="text-align: center;">1 2</p>	<p style="text-align: center;">1 2</p>	
		e. Kebijakan pemerintah desa dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan (khusus diisi oleh desa) TIDAK ADA ADA	<p style="text-align: center;">1 2</p>	<p style="text-align: center;">1 2</p>	

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		f. Alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan (khusus diisi oleh desa) TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
IV. DESA DAN KELURAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI/ E-GOVERNMENT					
1.	Ketersediaan sistem teknologi informasi berbasis internet	a. Jaringan Internet TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Website Desa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
2.	Perangkat komputer	a. <i>Software</i> Dengan Spesifikasi Minimal Untuk Operasi Jaringan Internet TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. <i>Hardware</i> Dengan Spesifikasi Minimal Untuk Operasi Jaringan Internet TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
4.	Administrasi	a. Administrasi Berbasis Teknologi Informasi - Administrasi umum TIDAK ADA ADA - Administrasi kependudukan TIDAK ADA ADA - Administrasi keuangan TIDAK ADA ADA - Administrasi BPD (Khusus diisi oleh Desa) TIDAK ADA ADA	1 2 1 2 1 2 1 2	1 2 1 2 1 2	

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		- Administrasi pembangunan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		- Administrasi lainnya TIDAK ADA ADA			
		b. Perangkat yang mengelola Teknologi Informasi TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Tersedia tokoh pemuda teknopreneur di tingkat RT/RW TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Perpustakaan <i>online</i> TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Internet gratis/ <i>HotSpot</i> TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
V. PELESTARIAN ADAT DAN BUDAYA					
1.	Pelestarian Adat dan Budaya	a. Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Adat dan Budaya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Keterlibatan Kelembagaan Adat dalam Pelestarian Adat dan Budaya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Pembinaan Seni Budaya Setempat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Oleh Siapa, sebutkan
		d. Kebijakan Menjaga kelestarian adat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Oleh Siapa, sebutkan
		e. Alokasi Anggaran Pelestarian Adat			Oleh Siapa, sebutkan



Jumlah kepala keluarga	:	
------------------------	---	--

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ....)	TAHUN KE-2 (THN ....)	
1	2	3	4	5	6
III. INOVASI					
1.	Embrio Aktivitas Inovasi	a. Adanya produk unggulan. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Adanya Peran pemerintah dalam mengelola produk unggulan. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Adanya keuntungan finansial untuk dari aktivitas ekonomi produktif. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Adanya keuntungan sosial dari aktivitas ekonomi produktif. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Adanya kegiatan kreatif yang membutuhkan teknologi. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
2.	Kelembagaan Inovasi	a. Adanya pelembagaan aktivitas inovasi masyarakat (mis. UMKM, koperasi, <i>cluster</i> ). TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Adanya peta rencana ( <i>roadmap</i> inovasi) secara berkelanjutan dalam mengembangkan produk unggulan desa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
3.	Jejaring Inovasi	a. Interkoneksi yang terbangun dalam pengelolaan produk inovasi masyarakat (mis. adanya divisi kerjasama dalam manajemen UMKM/BUMDes). TIDAK ADA ADA	1	1	

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ....)	TAHUN KE-2 (THN ....)	
1	2	3	4	5	6
			2	2	
		b. Kesepahaman dan kerjasama dengan pemerintahan sekitar dalam pengelolaan potensi khususnya produk unggulan. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Dukungan pemerintahan supra (mis. kecamatan, kabupaten, provinsi, atau pusat) bagi pengembangan produk unggulan. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Jaringan pengembangan (mis. dukungan dunia pendidikan dan keterampilan) untuk peningkatan kualitas produk unggulan. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Jejaring Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemasaran produk inovasi. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
4.	Budaya Inovasi Masyarakat	a. Teknologi tepat guna yang ditemukan masyarakat 2 tahun terakhir. TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	Lampirkan semua bukti
		b. Pemanfaatan teknologi tepat guna. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Lembaga penyedia teknologi. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Aktivitas masyarakat dalam pengembangan produk. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Upaya pelestarian pengembangan produk. TIDAK ADA	1	1	

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ....)	TAHUN KE-2 (THN ....)	
1	2	3	4	5	6
		ADA	2	2	
5.	Keterpaduan Inovasi Perencanaan	a. Adanya integrasi antara peta rencana ( <i>roadmap</i> ) inovasi dengan perencanaan pembangunan tahunan dan lima tahunan (Mis. Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah). TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Adanya sinergi pengembangan inovasi dengan kerangka Sistem Inovasi Daerah (SIDa). TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
6.	Kepekaan Masyarakat terhadap Dinamika Global/Ekonomi	a. Penemuan inovasi yang ramah lingkungan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampirkan Bukti Lengkap
		b. Kemampuan penyesuaian produk inovasi terhadap dinamika tuntutan konsumen/pasar TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Adanya rencana pengembangan produk inovasi di dalam maupun di luar desa dan kelurahan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Adanya sinergi berbagai lembaga dalam pembangunan inovatif ( <i>Heksagonal</i> ) TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
7.	Faktor-faktor Kunci dalam Pengelolaan Potensi secara Inovatif	a. Spesialisasi Produk Unggulan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Sebutkan produk unggulannya dan lembaga/unsur yang

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ....)	TAHUN KE-2 (THN ....)	
1	2	3	4	5	6
		b. Dukungan Penelitian dan Pengembangan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan potensi
		c. Pengembangan Sumber Daya Manusia ataupun dari Supranya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Ketersediaan dan Akses Bahan Baku dari dalam desa dan kelurahan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Ketersediaan Sumberdaya Modal dari pemerintah Desa dan Kelurahan atau pihak ke tiga TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		f. Pelatihan Kewirausahaan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		g. Adanya Kepemimpinan dan Visi Bersama dalam mengembangkan dan mengelola potensi Desa dan Kelurahan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
<b>IV. TANGGAP DAN SIAGA BENCANA</b>					
1.	Perencanaan Kontingensi	Adanya musyawarah perencanaan identifikasi bencana TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
2.	Peta Risiko bencana	a. Ketersediaan peta bencana beserta rambu-rambunya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Sosialisasi mengenai peta bencana pada masyarakat dalam waktu 2 tahun terakhir ini TIDAK ADA			

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ....)	TAHUN KE-2 (THN ....)	
1	2	3	4	5	6
		ADA	1 2	1 2	
3.	Sistem Peringatan Dini Terpusat Pada Masyarakat	a. Pengetahuan dan simulasi dalam menghadapi Risiko 2 tahun terakhir TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Sistem Pemantauan yang dikembangkan pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menghadapi bencana TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Layanan TIM penanganan bencana yang di bentuk Desa dan Kelurahan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Penyebarluasan dan Komunikasi tanggap bencana TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Alat deteksi dini bencana TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
4.	Infrastruktur Evakuasi	a. Tempat Evakuasi TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Jalur Evakuasi TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Sarana Evakuasi TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ....)	TAHUN KE-2 (THN ....)	
1	2	3	4	5	6
V. PENGATURAN INVESTASI					
1.	Investasi yang masuk ke Desa dan Kelurahan	a. Investasi yang masuk ke Desa dan Kelurahan dalam 2 tahun terakhir TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Apakah melibatkan BPD dan Pemerintah Desa dan Kelurahan TIDAK YA	1 2	1 2	
		c. Menyebabkan terjadinya pembebanan pada Desa dan Kelurahan TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		d. Menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		e. Mengurangi jumlah kepemilikan Tanah Desa/Tanah Kas Desa (Khusus Diisi Oleh Desa) TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	

C. BIDANG KEMASYARAKATAN

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
<b>I. PARTISIPASI MASYARAKAT</b>					
1.	Musyawaharah Dusun	a. Partisipasi Masyarakat TIDAK ADA ADA	1 5	1 5	
		b. Rasio Laki-Laki Dan Perempuan TIDAK SEIMBANG SEIMBANG	1 3	1 3	
2.	Swadaya Masyarakat Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa 2 Tahun Terakhir	Partisipasi Pendanaan Masyarakat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
3.	Swakelola Masyarakat Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa 2 Tahun Terakhir	Partisipasi Pengelolaan Pembangunan oleh Masyarakat TIDAK ADA TIM PENGELOLA KEGIATAN ADA TIM PENGELOLA KEGIATAN	1 2	1 2	
4.	Gotong Royong Penduduk Desa 2 Tahun Terakhir	Aktifitas Gotong Royong Penduduk TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	
<b>II. LEMBAGA KEMASYARAKATAN</b>					
1.	Organisasi Pemuda	Aktifitas Organisasi Pemuda TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
2.	Organisasi Profesi (petani, pedagang, nelayan, buruh, paguyuban, dll)	Aktifitas Organisasi Profesi TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
3.	Organisasi Olah Raga	Aktifitas Organisasi Olah Raga TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
4.	LPM atau Sebutan Lain	Aktifitas LPM TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
5.	Kelompok Gotong Royong	Aktifitas Kelompok Gotong Royong TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
6.	Karang Taruna	Aktifitas Karang Taruna TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
7.	Lembaga Adat, Budaya, Dan Kesenian	Aktifitas Lembaga Adat, Budaya, Dan Kesenian TIDAK ADA	1	1	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		ADA	2	2	
8.	Kelompok Usaha	Aktifitas Kelompok Usaha TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
9.	Koperasi	Memiliki Koperasi TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	
10.	Organisasi Perempuan	Aktifitas Organisasi Perempuan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
<b>III. PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)</b>					
1.	Lembaga PKK	Keberadaan PKK TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	
2.	Program PKK	Realisasi 10 Program Pokok TEREALISASI 1 KEGIATAN TEREALISASI di atas 1 KEGIATAN	1 2	1 2	
3.	Organisasi PKK	Kelengkapan Kelompok Kerja TIDAK LENGKAP LENGKAP	1 2	1 2	
		Kelengkapan Kelompok Dasawisma TIDAK LENGKAP LENGKAP	1 2	1 2	
<b>IV. KEAMANAN DAN KETERTIBAN</b>					
1.	Pengamanan Lingkungan Dan Manusia	a. Kerja sama pelestarian lingkungan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Kerja sama pemantauan limbah perusahaan yang ada di desa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		c. Kerja sama pendaur ulangan limbah TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Petugas keamanan lingkungan (Linmas) TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Pos kamling (Keamanan Lingkungan) TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
2.	Konflik SARA	a. Konflik antar kelompok TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		b. Konflik antar suku TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		c. Konflik berbau agama/kepercayaan TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		d. Konflik antar RAS TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
3.	Perkelahian	Kasus perkelahian yang menimbulkan korban dalam 2 tahun terakhir TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
4.	Pencurian dan perampokan	a. Kasus pencurian/perampokan biasa TIDAK ADA ADA	2 1	2 1	
		b. Kasus pencurian/perampokan dengan kekerasan TIDAK ADA ADA	2 1	2 1	
5.	Perjudian	Jumlah kasus perjudian dengan berbagai modus TIDAK ADA ADA	2 1	2 1	
6.	Narkoba	a. Jumlah kasus narkoba dengan pelaku pemerintah			

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		desa TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		b. Anggota Masyarakat yang Terkena Narkoba TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
7.	Prostitusi	Jumlah kasus prostitusi dengan berbagai modus TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
8.	Pembunuhan	a. Jumlah kasus pembunuhan TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		b. Jumlah kasus pembunuhan yang korbannya penduduk desa setempat TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		c. Jumlah kasus pembunuhan yang pelakunya penduduk desa setempat TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
9.	Kekerasan Seksual	Jumlah kasus perkosaan TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
10.	Kekerasan dalam Keluarga	a. Kekerasan terhadap anak TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		b. Kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
11.	Penculikan	Jumlah kasus penculikan TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
12.	HIV/AIDS	Kasus HIV/AIDS TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
V. PENDIDIKAN					

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
1.	Buta Huruf	Penduduk yang tidak bisa baca tulis TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
2.	Putus Sekolah	a. Jumlah Penduduk Tidak Tamat SD/ sederajat KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1%	4 1	4 1	
		b. Jumlah Penduduk Tidak Tamat SLTP/ sederajat KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1%	4 1	4 1	
3.	Tamat Sekolah	a. Jumlah penduduk tamat SLTA/ sederajat KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1%	1 4	1 4	
		b. Jumlah penduduk tamat D3/ Sarjana muda KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1%	1 4	1 4	
		c. Jumlah penduduk tamat Sarjana/ S-1 KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1%	1 4	1 4	
		d. Jumlah penduduk tamat Pasca Sarjana KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1%	1 4	1 4	
<b>VI. KESEHATAN</b>					
1.	Kematian Bayi	Jumlah Kematian Bayi PENURUNAN KURANG DARI 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA PENURUNAN DI ATAS 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA	1 4	1 4	
2.	Gizi dan Kematian Balita	a. Jumlah Balita Gizi Buruk PENURUNAN KURANG DARI 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA PENURUNAN LEBIH DARI 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA	1 2	1 2	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		b. Jumlah Balita Meninggal KURANG DARI 1% DI ATAS 1%	2 1	2 1	
3.	Posyandu	a. Keberadaan Posyandu TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	
		b. Kelembagaan PRATAMA DI ATAS PRATAMA	1 4	1 4	
		a. Jumlah RT Pengguna Sumber Air Lainnya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
5.	Kepemilikan Jamban Dalam Rumah Tangga (RT)	a. Total RT Mempunyai Jamban/WC sendiri MENURUN TETAP MENINGKAT	1 2 3	1 2 3	
		b. Total RT yang tidak memiliki jamban/WC sendiri MENURUN TETAP MENINGKAT	3 2 1	3 2 1	
		c. Total RT pengguna MCK umum MENURUN TETAP MENINGKAT	1 2 3	1 2 3	
		d. Total RT pengguna MCK di sungai/kali MENURUN TETAP MENINGKAT	3 2 1	3 2 1	
		e. Total RT yang tidak mendapat air bersih MENURUN TETAP MENINGKAT	3 2 1	3 2 1	
6.	Fasilitas Kesehatan Lingkungan	a. Puskesmas/Balai Pengobatan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Bidan/Mantri/Dokter TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Jamban Keluarga/MCK			

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
<b>VII. EKONOMI</b>					
1.	Pengangguran	Jumlah penduduk usia 15-65 tahun yang tidak bekerja KURANG DARI 10% LEBIH DARI ATAU SAMA DENGAN 10%	4 1	4 1	
2.	Mata Pencarian/Sumber Pendapatan ( <i>Checklist</i> mayoritas penduduk yang mana dan lingkar khusus yang Pendapatan Perkapita)	Pertanian			
		Industri			
		Jasa			
3.	Kelembagaan Ekonomi	a. Pasar Tradisional TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Toko/Kios TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Pangkalan Ojek, Becak, Delman, Dan Sejenisnya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
<b>VIII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN</b>					
1.	Data Masyarakat Miskin	Data Masyarakat Miskin TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
2.	Program Penanggulangan Kemiskinan	Program Penanggulangan Kemiskinan TIDAK ADA ADA	1 3	1 3	
<b>IX. PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT</b>					
1.	Analisis Kebutuhan	a. Penyusunan Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Masyarakat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Banyaknya Kegiatan Dalam Peningkatan Kapasitas Masyarakat 1-3 LEBIH DARI 3	1 2	1 2	
2.	Pelaksanaan Program	Jumlah Jenis program Peningkatan Kapasitas Masyarakat 1-3 Lebih dari 3	1 2	1 2	

### **SASARAN 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja**

#### **Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah**

##### **a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021**

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Satuan Kerja yang diukur dengan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah berada pada kategori “Sesuai Target”. Hal tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga pencapaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Uraian dan penjelasan indikator kinerja pada sasaran 3 adalah sebagai berikut :

<b>ET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN%</b>

Berdasarkan surat dari Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar nomor : B-003.w/LHE/Itkab/700/7/2021 tanggal 23 Juli 2021, tingkat Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memperoleh nilai hasil 71,98 dengan predikat **BB**. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dengan rincian :

#### **1. Perencanaan Kinerja**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar telah memiliki dokumen perencanaan strategis (Renstra Tahun 2019-2024), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020. Perencanaan Kinerja telah memuat sasaran, indikator dan target kinerja dengan menjabarkan sasaran strategis dan indikator kinerja dilevel kabupaten ke level OPD sampai ke level atasan dan bawahan (eselon III dan IV). Berdasarkan evaluasi,beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan selanjutnya adalah sebagai berikut :

- 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan perbaikan pada Rencana Strategis (Renstra Tahun 2019-2024) dengan memuat sasaran strategis, indikator dan targetnya yang telah berorientasi hasil. Namun perlu dilakukan monitoring target jangka menengah tahun berjalan secara optimal dan melakukan reviu secara berkala atas dokumen renstra untuk menunjang pencapaian sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan.
- 2) Target kinerja yang diperjanjikan belum digunakan untuk mengukur keberhasilan hanya dijadikan dasar untuk menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan setiap kegiatan.
- 3) Monitoring capaian target kinerja dalam rencana aksi belum dilakukan secara optimal dan capaian rencana aksi belum dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

## 2. Pengukuran Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Indikator Kinerja Utama tingkat OPD hingga pejabat eselon IV dan telah dilakukan pengukuran kinerja secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator dan target yang diperjanjikan dan pengukuran sudah menggunakan aplikasi monitoring kinerja sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat. Namun indikator kinerja eselon III dan IV belum sepenuhnya mengacu pada indikator kinerja atasan/unit kerjanya. Selain itu pengukuran kinerja belum dilakukan secara tertib sehingga data kinerja yang dihasilkan tidak sepenuhnya dapat diandalkan dan hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan sebatas hanya untuk menyimpulkan kemajuan atau progress kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar untuk mengambil tindakandalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dan untuk menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

## 3. Pelaporan Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2020 dan disampaikan kepada Bupati Polewali Mandar melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana secara tepat waktu. Berdasarkan evaluasi, Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar telah menyajikan informasi mengenai pencapaian kinerja utama dan target yang telah dicapai sampai dengan saat ini. Namun masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan selanjutnya, sebagai berikut :

- 1) Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome hanya berfokus pada informasi tentang kegiatan/proses yang telah dilaksanakan.
- 2) Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja.
- 3) Laporan kinerja belum menyajikan evaluasi dan analisis tentang capaian-capaian kinerja dan belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan sehingga Laporan Kinerja tidak dapat diandalkan dan digunakan untuk perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk peningkatan dan penilaian kinerja.
- 4) Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran.
- 5). Pemanfaatan informasi kinerja juga belum efektif dalam mendorong berbagai perbaikan capaian kinerja yang diperlukan.

## 2. Evaluasi Internal

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan evaluasi secara internal untuk memantau perkembangan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya. Namun evaluasi yang dilaksanakan berupa evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggarannya,

hanya sebatas memberikan informasi capaian hasil-hasil program belum memberikan informasi keberhasilan atau ketidakberhasilan program dan tindak lanjut untuk pelaksanaan program di masa yang akan datang sehingga evaluasi program belum sepenuhnya memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar.

### **3. Capaian Kinerja**

Pencapaian Kinerja dinilai dari aspek pencapaian target output dan outcome Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibandingkan dengan kinerja OPD lainnya, selain itu pencapaian kinerja juga termasuk kinerja dari penilaian stakeholders yang meliputi kinerja pengelola keuangan, pendapat masyarakat/media, penilaian OPD lainnya, transparansi dan penghargaan lainnya.

#### **Adapun rekomendasi Inspektorat terkait hasil Evaluasi AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :**

- a. Melakukan monitoring target jangka menengah tahun berjalan dan melakukan reviu secara berkala atas dokumen renstra untuk penyempurnaan sasaran dan indikator kinerja sasaran serta menyempurnakan kualitas indikator kinerja pada level organisasi terkecil (eselon III dan IV serta staf).
- b. Melakukan pengukuran kinerja secara tertib dan memanfaatkan informasi kinerja yang dihasilkan dari aplikasi monitoring kinerja secara optimal dengan melakukan perbaikan strategi dan program/kegiatan untuk pencapaian kinerja yang diperjanjikan.
- c. Memperkuat komitmen kepala OPD serta pejabat eselon III dan IV serta staf untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik berdasarkan pada perencanaan kinerja melalui Rencana Aksi Kinerja dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
- d. Menyempurnakan penyajian informasi kinerja dalam laporan kinerja dengan menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja, menyajikan hasil evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan, menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran serta memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan dan perbaikan strategi (program/kegiatan) yang diperlukan.
- e. Meningkatkan kualitas evaluasi program dengan membuat kesimpulan mengenai keberhasilan atau tidak berhasil program yang disertai dengan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja dan

memanfaatkan hasilnya secara optimal untuk perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

- f. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja untuk mewujudkan pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.
1. Memperhatikan dan menindaklanjuti saran atau rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar.

**b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA (2019-2020)**

Pada tabel dibawah ini disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Satuan Kerja yang diukur dengan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah untuk tahun 2021 dengan tahun – tahun sebelumnya :

**Tabel 8**  
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021  
DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2019 dan 2020)

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		
		2018	2019	2020
Meningkatnya Kualitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	N/A	B	BB

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi Kinerja antara 2020, 2019 dengan tahun 2018 tidak dapat diperbandingkan. Hal ini disebabkan adanya rewiuw atau perubahan terhadap sasaran dan indikator kinerja Renstra yang dilaksanakan pada tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2019 ke tahun 2020 capaian kinerja ada peningkatan predikat SAKIP dari B ke BB.

**c. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET 5 TAHUN RENSTRA**

Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2020 sasaran strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Satuan Kerja yang diukur dengan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah dengan Target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024 sebagai berikut :

**Tabel 9**

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 3  
TAHUN 2020 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019-2024**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2019	TARGET RENSTRA PMD			
					2015	2016	2017	2018
Terwujudnya Profesionalisme Manajemen ASN	Meningkatnya Kualitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	N/A	N/A	N/A	B

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 terhadap target jangka menengah (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024 dapat dianalisa bahwa untuk sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Kinerja Satuan Kerja yang diukur dengan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah, perlu dipertahankan dan disempurnakan pada target di tahun berikutnya pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar. Adapun untuk tahun 2020 realisasi kinerja dengan predikat BB.

**d. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Kualitas Kinerja Satuan Kerja yang diukur dengan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah yang dijalankan oleh Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan dengan jumlah pegawai sebanyak 4 (empat) orang dengan 1 Program dan 3 kegiatan yang anggarannya sebesar **Rp.19.979.400**.

**e. KENDALA DAN SOLUSI**

**Kendala**

Dalam upaya perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah, berikut hal-hal yang seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaannya yaitu :

1. Pemahaman para pejabat struktural terkait penyusunan Perjanjian Kinerja masih kurang.
2. Hasil pengukuran kinerja yang sudah ada, belum dijadikan acuan untuk mengevaluasi setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Belum intensifnya kegiatan reviu renstra untuk memperbaiki capaian terhadap tujuan dan sasaran OPD.
4. Masih kurangnya dokumentasi pada setiap program/kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sehingga mempengaruhi kualitas penyajian informasi hasil pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan.

**Solusi**

1. Memaksimalkan pelaksanaan rapat internal untuk memberikan pemahaman terhadap para pejabat pelaksana program/kegiatan dan sub kegiatan tentang korelasi antara tujuan dan sasaran renstra dengan Perjanjian Kinerja yang telah disusun.

2. Memaksimalkan aplikasi SAKIP yang sudah ada untuk melakukan pengukuran terhadap program/kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan.
3. Mengintensifkan koordinasi dan komunikasi terhadap setiap bidang terkait program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.
4. Memberikan format khusus kepada setiap pelaksana kegiatan dan sub kegiatan untuk pelaporan pelaksanaan masing-masing kegiatan atau sub kegiatan.

**a. PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG**

Upaya pencapaian target Predikat SAKIP Perangkat Daerah dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan diantaranya :

**Tabel 10**  
PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG REALISASI CAPAIAN KINERJA  
SASARAN3

No	Program/Kegiatan	Outcomes	Target	Output	Target	Lokasi	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	1 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	1 dokumen	Kab. Polewali Mandar	8.040.000
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-DPA/DPPA perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	3 dokumen	Jumlah dokumen RKA-DPA/DPPA perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	3 dokumen	Kab. Polewali Mandar	4.622.000
3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah LAKIP, LPPD dan laporan pertanggungjawaban bupati pada perangkat daerah yang tersusun sesuai dengan standar dan tepat waktu	1 dokumen	Jumlah LAKIP, LPPD dan laporan pertanggungjawaban bupati pada perangkat daerah yang tersusun sesuai dengan standar dan tepat waktu	1 dokumen	Kab. Polewali Mandar	7.317.400
<b>Total Anggaran</b>							<b>Rp.19.979.400</b>

## SASARAN 4 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Indikator : Opini Pengelolaan Keuangan

### a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yang diukur dengan Opini Pengelolaan Keuangan berada pada kategori “Sesuai Target”. Hal tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan kegiatan dan sub kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga pencapaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Sebagai gambaran target dan realisasi tahun 2020 untuk indikator kinerja pada sasaran 4 adalah sebagai berikut :

<b>TARGETTARG</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN %</b>
<b>WTPBB</b>	<b>WTPBB</b>	<b>100%100 %</b>

### b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA (2019-2021)

Pada tabel dibawah ini disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yang diukur dengan Opini Pengelolaan Keuangan untuk tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya :

**Tabel 11**

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2019 dan 2020)

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		
		2019	2020	2021
Meningkatnya kualitas pengelolaan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja antara 2019 sampai 2020 Opini Pengelolaan Keuangan dengan memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hal ini disebabkan adanya rewiuw atau perubahan terhadap sasaran dan indikator kinerja Renstra yang dilaksanakan pada tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2019 sampai tahun 2020 capaian kinerja opini pengelolaan keuangan tetap bisa dipertahankan sesuai dengan target.

### c. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET 5 TAHUN RENSTRA

Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sasaran strategis 4 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan

Perangkat Daerah yang diukur dengan Opini Pengelolaan Keuangan dengan target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024 sebagai berikut :

**Tabel 12**  
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 4**  
**TAHUN 2021 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019-2024**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2019	TARGET RENSTRA PMD			
					2015	2016	2017	2018
Terwujudnya Profesionalisme Manajemen ASN	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan keuangan	WTP	WTP	N/A	N/A	N/A	WTP

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 terhadap target jangka menengah (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024 dapat dianalisa bahwa untuk sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yang diukur dengan Opini Pengelolaan Keuangan, perlu dipertahankan dan disempurnakan pada target di tahun berikutnya pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar. Untuk tahun 2019-2020 realisasi kinerja dengan memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

**d. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yang diukur dengan Opini Pengelolaan Keuangan yang dijalankan oleh Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan dengan jumlah pegawai sebanyak 4 (empat) orang dengan 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yang anggarannya sebesar **Rp. 7.415.023**.

**e. KENDALA DAN SOLUSI**

Kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target sasaran strategis 4 yaitu :

1. Jumlah pegawai yang tersedia masih kurang dan belum sesuai dengan ABK/Analisis Beban Kerja
2. Belum maksimalnya kualitas SDM aparatur/ASN dalam melaksanakan tupoksinya.

Langkah-langkah yang perlu ditempuh/solusi atas permasalahan tersebut diatas yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait penyusunan laporan keuangan melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi realisasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan.
2. Pengajuan usulan pemenuhan kebutuhan pegawai berdasarkan ABK/Analisis Beban Kerja yang telah ditetapkan.

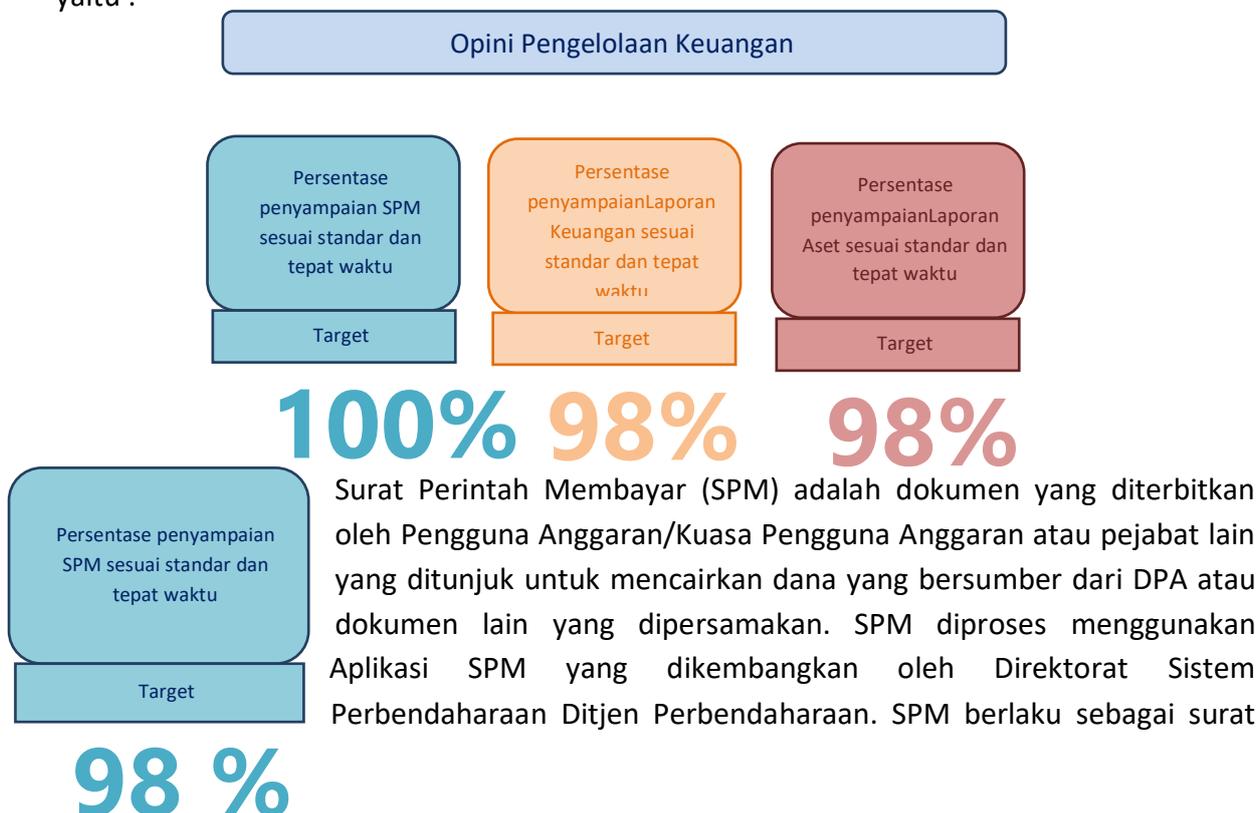
**f. PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG**

Upaya pencapaian target Predikat SAKIP Perangkat Daerah dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan diantaranya :

Tabel 13  
PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG REALISASI CAPAIAN KINERJA  
SASARAN 4

No	Program/Kegiatan	Outcomes	Target	Output	Target	Lokasi	Anggaran
1	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran	Persentase tertib administrasi keuangan	3 dokumen	Jumlah dokumen Laporan keuangan berkala sesuai standar dan tepat waktu	3 dokumen	Kab. Polewali Mandar	3.500.000
2	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase tertib administrasi keuangan	1 dokumen	Jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun sesuai dengan standar dan tepat waktu	1 dokumen	Kab. Polewali Mandar	3.915.023
<b>Total Anggaran</b>							Rp.7.415.023

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diukur dengan indikator opini pengelolaan keuangan. Indikator dimaksud mencakup 3 hal yaitu :



perintah kepada Badan Keuangan sebagai kuasa BUD di daerah untuk mencairkan dana APBD. SPM Terdiri atas :



**SPM Belanja Pegawai :**

- SPM Gaji Induk
- SPM Gaji Susulan
- SPM Kekurangan Gaji
- SPM Uang Duka Wafat
- SPM Persekot Gaji
- SPM Gaji Terusan

**SPM Belanja Barang lain-lain :**

- SPM Langsung
- SPM Uang Persediaan
- SPM Tambahan Uang Persediaan
- SPM Pengganti Uang Persediaan
- SPM Pengganti Uang Persediaan Nihil

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki peranan penting dalam penyusunan akhir laporan keuangan perangkat daerah. Pengelolaan SPJ yang tepat waktu merupakan kunci utama dalam ketepatan penyelesaian laporan keuangan. Beberapa dokumen yang harus diperhatikan adalah SPP UP, GU, TU, LS Gaji, LS Barang dan Jasa, SPM UP/GU/TU/LS, Buku Kas Umum, Buku Pembantu, Register SPP/SPM/SP2D, LPJ UP, LPJ TU, Laporan Penutupan Kas Bulanan, SPJ Administratif dan SPJ Fungsional. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah ketertiban dan tanggung jawab SKPD terkait yaitu Bendahara Pengeluaran dalam pembuatan SPJ administratif dan SPJ Fungsional sangat berpengaruh dalam kemudahan proses penyusunan laporan keuangan.

Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu

Target

98

**REALISASI**

Untuk realisasinya sendiri mencapai 98% (sesuai target). Beberapa dokumen laporan keuangan yang disusun sudah sesuai standar dan pelaporannya tepat waktu.

**KENDALA**

Beberapa kendala yang sering ditemukan dalam penyusunan Laporan Keuangan diantaranya :

1. Kurangnya tanggung jawab dalam membuat SPJ disetiap transaksi. Terutama dalam penatausahaan belanja, yaitu SPJ Administratif dan SPJ Fungsional.
2. Mengalami kesulitan dalam pembuatan catatan atas laporan keuangan
3. Perhitungan pembayaran pajak atas belanja barang dan jasa

**SOLUSI**

1. Pengawasan sekretariat atas penyusunan SPJ dari masing-masing bidang lebih diintensifkan melalui rapat monitoring dan evaluasi laporan keuangan per triwulan.
2. Penguatan pengendalian penyusunan laporan keuangan melalui pengembangan SDM petugas verifikasi SPJ.

Persentase penyampaian Laporan Aset sesuai standar dan tepat waktu

Target

80%

#### REALISASI

Untuk realisasinya sendiri mencapai 80% (sesuai target) laporan aset yang dilaporkan sesuai standar dan tepat waktu

#### KENDALA

Kendala yang sering dijumpai dalam penyusunan laporan aset adalah pencatatan aset itu sendiri, dimana jumlah aset tetap berbeda dengan daftar inventarisasi dikarenakan adanya kesulitan dalam mengklasifikasi nilai aset (terutama dalam kapitalisasi aset).

#### SOLUSI

Pengembangan SDM bendahara barang dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan laporan aset Perangkat Daerah.

Pengelolaan dan Penatausahaan Aset menjadi hal yang sangat penting, temuan yang paling dominan yang menyebabkan Pemerintah Daerah gagal mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terdapat di aset. Nilai aset tetap merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain pada neraca laporan keuangan. Sehingga penatausahaan aset sangat perlu untuk diperhatikan. Dalam hal ini, perangkat daerah harus bisa menguasai pengukuran aset, penyusutan, penilaian kembali, pelepasan aset, dan inventarisasi aset.



## SASARAN 5 : Meningkatkan Kualitas Manajemen Perkantoran

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder

### a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan Kualitas Manajemen Perkantoran yang diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat berada pada kategori “Sesuai Target”. Hal tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga pencapaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Sebagai gambaran target dan realisasi tahun 2020 untuk indikator kinerja pada sasaran 5 sebagai berikut :

TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Baik	Baik	100%

### b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA (2019-2020)

Pada tabel dibawah ini disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja pada Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan Kualitas Manajemen Perkantoran yang diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat untuk tahun 2021 dengan tahun sebelumnya :

**Tabel 14**  
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021  
DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2019 dan 2020)

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		
		2019	2020	2021
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja antara 2020 dengan tahun 2019 sesuai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024. Hal ini disebabkan adanya reuiu atau perubahan terhadap sasaran dan indikator kinerja Renstra yang dilaksanakan pada tahun 2019.

### b. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET 5 TAHUN RENSTRA

Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2020 untuk sasaran strategis 5 : Meningkatkan Kualitas Manajemen Perkantoran yang diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan

target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024 sebagai berikut :

**Tabel 15**  
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 5**  
**TAHUN 2021 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019-2024**

TUJUAN	SASAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RELISASI RENSTRA PMD					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Profesionalisme Manajemen ASN	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	-	-	-	-

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasikinerja dan capaian kinerja tahun 2021 terhadap target jangka menengah (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024 dapat dianalisa bahwa untuk sasaran 5 : Meningkatkan Kualitas Manajemen Perkantoran yang diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, perlu dipertahankan dan disempurnakan pada target di tahun berikutnya pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar. Adapun realisasi kinerja untuk tahun 2019-2020 sesuai dengan target yang terdapat dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024.

**c. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan Kualitas Manajemen Perkantoran yang diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat yang dijalankan oleh Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan jumlah pegawai sebanyak 10 (sepuluh) pegawai dengan 4 kegiatan dan 13 sub kegiatan yang anggarannya sebesar **Rp.616.298.112**.

**d. KENDALA DAN SOLUSI**

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah :

1. Belum optimalnya koordinasi antara Bidang dengan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Belum maksimalnya kualitas SDM aparatur/ASN dalam melaksanakan tupoksinya

Langkah-langkah yang diperlukan/solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Mengoptimalkan koordinasi yang dilakukan terhadap setiap bidang selaku penyedia layanan manajemen perkantoran
2. Melakukan upaya peningkatan kualitas SDM terhadap aparatur/ASN yang menyiapkan layanan manajemen perkantoran
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia ASN melalui pelatihan/bimbingan teknis/diklat

**e. PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG**

Upaya pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder dilaksanakan melalui 1 program dan 16 (enam belas) kegiatan diantaranya :

**Tabel 16**  
**PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG REALISASI CAPAIAN KINERJA**  
**SASARAN 5**

NO	PRGRAM KEGIATAN	OUTCOMES	TARGET	OUTPUT	TARGET	LOKASI	ANGGARAN
1	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Presentase pengiriman surat menyurat	12 bulan	Jumlah paket surat masuk dan keluar	660 surat	Polewali mandar	Rp. 994.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Presentase paket jasa komunikasi, air, listrik dan internet	12 bulan	Jumlah paket jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	3 jenis	Polewali mandar	Rp.83.166.100
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional	Presentase STNK kendaraan dinas	12 bulan	Jumlah kendaraan dinas yang tertib perizinan	2 jenis	Polewali mandar	Rp.29.400.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase ATK dan jumlah paket jasa kebersihan kantor	12 bulan	Jumlah ATK dan jumlah paket jasa kebersihan kantorgedung yang tersedia	3 jenis	Polewali mandar	Rp.123.342.312
5	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Presentase efektifitas pengelolaan brosur pelayanan kepegawaian dan cetak lainnya	12 bulan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	4 jenis	Polewali mandar	Rp12.567.300
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase barang bacaan yang tersedia	12 bulan	Jumlah barang bacaan yang tersedia	3 jenis	Polewali mandar	Rp12.720.000
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase kebutuhan penerangan dan instalasi listrik	12 bulan	Jumlah paket komponen listrik penerangan kantor yang tersedia	9 jenis	Polewali mandar	Rp2.799.500
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Presentase paket makan minum dan logistic kantor	12 bulan	Jumlah paket makan minum dan logistik kantor yang tersedia	3 jenis	Polewali mandar	Rp31.440.000
9	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Presentase akuntabilitas pelaksanaan manajemen kepegawaian	12 bulan	Jumlah paket laporan hasil perjalanan dinas luar daerah yang tersusun	441 dokumen	Polewali mandar	Rp113.739.800
10	Pengadaan Komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya	Jumlah laptop dan computer yang tersedia	12 bulan	Jumlah laptop dan computer yang tersedia	4 unit	Polewali mandar	Rp70.919.100
11	Pengadaan Pakaian PDH	Jumlah kain yang tersedia	12 bulan	Jumlah kain yang tersedia	44 lembar	Polewali mandar	Rp15.965.000
12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Presentase sinergitas pelaksanaan manajemen kepegawaian	12 bulan	Jumlah paket hasil koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang tersusun	232 dokumen	Polewali mandar	Rp97.945.000
13	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Presentase pengadaan peralatan kantor yang tersedia	12 bulan	Jumlahpaket gedung kantor yang tersedia	1 unit	Polewali mandar	Rp10.000.000
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Presentase tertib pengadaan dan pemeliharaan gedung, perlengkapan dan peralatan kantor	12 bulan	Jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	1 unit	Polewali mandar	Rp11.300.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>							<b>Rp..616.298.112</b>

Berikut beberapa fungsi manajemen perkantoran :

1. Perencanaan

Fungsi perencanaan (planning) dalam manajemen perkantoran yaitu fungsi yang akan digunakan dalam menentukan tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Pengorganisasian

Fungsi pengorganisasian (organizing) dalam manajemen perkantoran ini dapat mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang sudah dibagi tersebut.

3. Pengarahan

Fungsi pengarahan (commanding) dalam manajemen perkantoran merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah atau instruksi pada bawahan dalam menjalankan tugas, agar tugas dapat dijalankan dengan baik dan tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan sejak awal.

4. Pengawasan

Fungsi pengawasan (controlling) dalam manajemen perkantoran sangat diperlukan untuk menjaga agar semua kegiatan dan efektivitas penggunaan sumber daya yang ada tidak menyimpang dari rencana sehingga tujuan organisasi dapat terwujud.



## **Analisis Efisiensi Sumber Daya (Keuangan)**

Untuk mencapai target sasaran tahun 2021, maka proses monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan secara ketat. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap triwulan, untuk memastikan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan. Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan dimaksud diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas 6 kegiatan dan 19 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.3.034.971.213;
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri atas 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.3.383.510.856;
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, terdiri atas 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.123.948.300;

### **DISTRIBUSI PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2021**

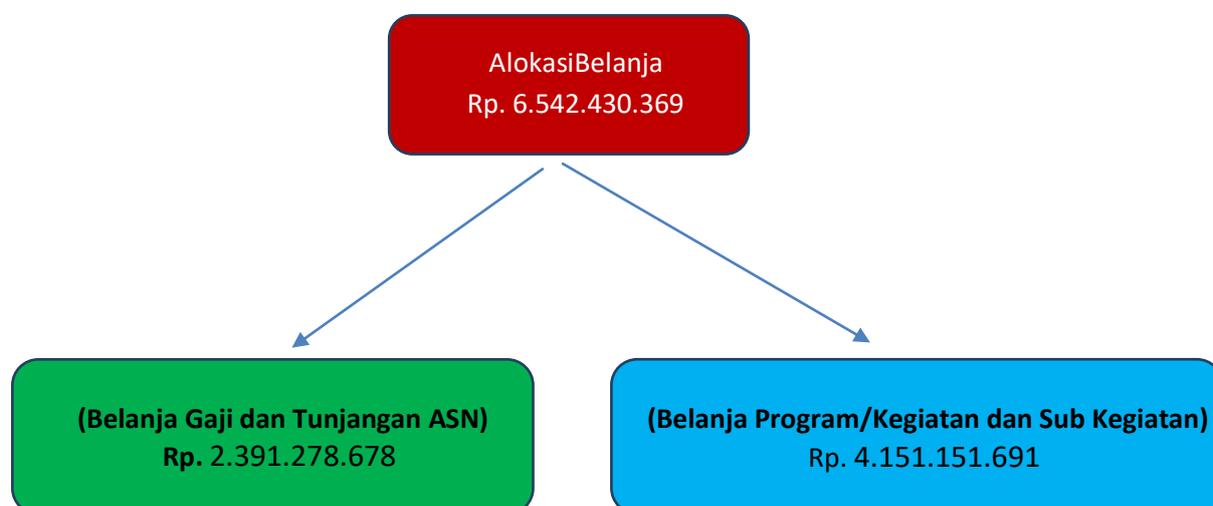
<b>Sasaran 1</b> <b>Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal</b>	<b>1 Program</b>	<b>Rp.123.948.300</b>
<b>Sasaran 2</b> <b>Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa</b>	<b>1 Program</b>	<b>Rp.3.383.510.856</b>
<b>Sasaran 3</b> <b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja</b>	<b>1 Program</b>	<b>Rp.3.034.971.213</b>
<b>Sasaran 4</b> <b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1 Program</b>	<b>Rp.3.034.971.213</b>
<b>Sasaran 5</b> <b>Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran</b>	<b>1 Program</b>	<b>Rp.3.034.971.213</b>

# AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penggunaan sumberdaya finansial. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik harus pula disertai laporan akuntabilitas keuangan, sehingga efisiensi dan efektifitas penganggaran dapat diukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan. Berikut ini akan disajikan serangkaian informasi keuangan tahun anggaran 2021.

## 1. JENIS BELANJA

Tahun Anggaran 2021 total pagu yang dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp. 6.542.430.369



### 1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Adalah Anggaran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai/ASN dengan Alokasi atau target Rp.2.391.278.678 dengan realisasi Rp.2.343.226.622 dengan capaian persentase sekitar 97,9 persen.

### 2) Belanja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adalah Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan dan sub kegiatan dengan Alokasi atau target Rp.4.151.151.691 dengan realisasi Rp.4.095.551.172 dengan capaian persentase sekitar 98,6 persen.

## 2. REALISASI BELANJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	PROGRAM	PAGU POKOK DAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.034.971.213	2.974.061.401	60.909.812
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.383.500.856	3.342.280.093	41.220.763
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	123.948.300	122.426.500	1.521.800

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Polewali mandar disusun dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *Good Governance*. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini juga memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Laporan LAKIP ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014-2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2021.

Menindaklanjuti berbagai kebijakan yang tertuang dalam Visi, Misi dan Sasaran Renstra, maka pada tahun 2021 telah ditetapkan 3 program dan 27 kegiatan/sub kegiatan agar program dan kegiatan tersebut mencapai sasaran yang telah ditetapkan, telah pula ditetapkan 7 Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari 7 indikator yang ditetapkan, secara umum dapat dinyatakan telah dicapai dengan baik. Dengan kategori capaian sebagai berikut 7 indikator dengan capaian kinerja 100%.

Adapun sejumlah saran tindak lanjut yang perlu diupayakan untuk penyempurnaan pencapaian kinerja Perangkat Daerah dalam rangka Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada tahun-tahun selanjutnya antara lain :

1. Memantapkan komitmen jajaran Pejabat administrasi, Pejabat Pengawas dalam melakukan perubahan mindset menuju pemerintahan berorientasi hasil, yang terimplementasi mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan dan review terhadap hasil kerja atau kinerja.

2. Melakukan penajaman indikator-indikator yang digunakan sebagai alat ukur pencapaian target kinerja. Menata program/kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang berpengaruh langsung pada pencapaian sasaran-sasaran perangkat daerah.

Meskipun demikian, laporan ini dapat disusun sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditetapkan, serta disampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut pada tingkat atasan. Jika dalam penyusunan LAKIP ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan saran dari berbagai pihak tetap diharapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pembangunan di masa yang akan datang.

Polewali, 10 Februari 2022  
Kepala DPMD,

**Hj. ANDI NURSAMI M, SE, M.Adm.KP**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip. 19650625 199503 2 001